



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUKIMIN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 880576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.525.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1675 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 252.000.000
3. Tanah Seluas 2040 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
4. Tanah Seluas 947 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 473.500.000
5. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/200 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 845 m2/400 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 275.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS STASION WAGON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO FITS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3. MOTOR, HONDA SUPRAX SOLO SUPRA X Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA BIT SOLO BIT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	80.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.704.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.887.204.000
III. HUTANG	Rp.	45.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.842.204.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.